**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

1. **Kajian Pustaka**
2. **Konsep Dasar Pemberdayaan Masyarakat**

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan erat kaitannya dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan.

Suharto (2009:58) mengatakan bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pada masa sekarang, pemberdayaan telah menebus berbagai disiplin ilmu, sehingga banyak definisi pemberdayaan yang diberikan oleh para ahli sesuai dengan bidang ilmu kajiannya.

Rukminto (2001:78) mengatakan bahwa “Pada intinya pengertian pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka”

Menurut Jhohani (Anwas 2013:49) “pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) pada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowerd*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerfull*) sehingga terjadi keseimbangan”.

Pengertian pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, member wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu kepada masyarakat sehingga mampu menatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Secara lebih rinci Slamet (Anwas 2013:49) menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah

Bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu sebagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan mengakap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

Menurut Suharto (Anwas 2013:50)pemberdayaan paling tidak memiliki empat hal, yaitu:

1. Merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif.
2. Memperbaiki kehidupan masyarakat.
3. Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung.
4. Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

Menurut Ife (Suharto 2009:59), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yakni kekuasaan kelompok lemah. Kekuasaan di sini di artikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

1. Pilihan-pilihan personal dan kesemptan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
2. Pendefinisian kebutuhan : kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
3. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan
4. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahtraan sosial, pendidikan, kesehatan.
5. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
7. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perwatakan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki keparcayaan diri , maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagi sebuah proses.

Istilah pemberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan sering diterjemahkan sebagai upaya memberikan kekuatan kepada orang lain atau kelompok yang lemah atau miskin agar mereka menyadari keadaan dirinya dan akhirnya mampu melakukan aksi untuk ke luar dari lingkaran kemisikinan tersebut.

Lebih lanjut, Spance dan Shepherd (Anwar, 2007:78) menyatakan bahwa “pemberdayan diri dan kelompok dapat menjadi lebih berdaya dengan mempelajari/pelatihan keterampilan hidup meningkatkan minat bakat”.

Secara esensial, pemberdayaan memiliki dua ciri: pertama, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua pemberdayaan merupakan proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran, dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan sikap mandiri dan berpartisipasi dalam pembanguanan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Partisipasi merupakan komponen penting dalam membangkitkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaiknya orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh penghargaan diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki seseorang semakin baik pula kemampuan partisipasinya.

Dari berbagai pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses dalam memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada diri individu, kelompok ataupun komunitas sehingga dapat menolong dirinya sendiri dan berpartisipasi serta berfungsi secara sosial sehingga lepas dari ketergantungan.

1. Tujuan pemberdayaan masyarakat

(Sulistiyani 2009:79) mengatakan Tujuan pemberdayaan masyarakat membantu pengembangan dari masyarakat lemah, renta, miskin, marjinal dan kelompok wanita yang didiskriminasi atau dikesampingkan. Memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan dalam pengembangan masyarakat.

Menurut Sulistiyani (2009:80) mengemukakan tujuan pemberdayaan adalah sebagai berikut:

Yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, berpikir dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemanpuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang di pandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemanpuan yang terdiri atas kemanpuan kognitif,efektif dan psikomotorik dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Pemberdayaan masayarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakekatnya merupakan kemanpuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atau permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarkat yang diharapkan pada perilaku sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemanpuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

1. Tahap-tahap pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan pendapat Sulistiyani (2009:83) proses belajar dalam pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui yaitu “tahap penyadaran, tahap transformasi, dan tahap pengayaan”. Selaunjtnya diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Pada tahap ini pihak pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat menfasilitasi berlangsung proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dengan demikian akan dapat berlangsung kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk masa depan yang lebih baik.
2. Tahap transformasi kemanpuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.
3. Tahap pengayaan/peningkatan kemanpuan intelektual , kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemanpuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemanpuan masyarakat didalam membetuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan dan pemeran utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitator saja.

Menurut Hogan (Adi Isbandi 2001:173) menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan terdiri dari lima tahap utama, yaitu menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan, mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan ketidakberdayaan, mengidentifikasikan suatu masalah ataupun proyek, mengidentifikasikan basis adanya daya yang bermakna dan mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya. Sumodiningrat (Suryana,2009:24) berpendapat bahwa masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja. Masyarakat tersebut tetap memerlukan perlindungan supaya dengan kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan.disamping itu kemandirian mereka perlu dilindungi supaya dapat terpupuk dan terpelihara dengan baik dan selanjutnya dapat membentuk kedewasaan sikap masyarakat.

1. Sasaran pemberdayaan masyarakat

Perlu dipikirkan siapa yang sesungguhnya menjadi sasaran pemberdayaan. Schumacher (Suryana 2009:29) memiliki pandangan pemberdayaan sebagai “suatu bagian dari masyarakat miskin yang tidak harus menghilangkan ketimpangan strukturalterlebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya memiliki daya untuk membangun”.

Secara umum masyarakat yang harus diberdayakan ( Suryana:2009) yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat yang belum mandiri
2. Masyarkat dengan ekonomi rendah, yaitu mereka yang memang hidup secara nyata berkekurangan, setelah berusaha secara maksimal memperoleh penghasilan, namun penghasilan yang didapatkan masih belum mencukupi kebutuhan hidupnya.
3. Mereka yang sebenarnya mempunyai kesempatan dalam melakukan upaya untuk menperoleh rezeki namun dalam menjalani pekerjaan atau usahanya, seringkali mengeluh ketika penghasilan diperolehnya tidak manpu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya dan keluarganya.
4. Strategi pemberdayaan masyarakat

Strategi pemberdayaan adalah suatu cara dalam mengoptimalkan upaya-upaya pemberdayaan yaitu dengan cara mengangkat dan mengembangkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan lebih lanjut dalam rangka memperbaiki taraf kehidupan.

Menurut Kindervatter (1983:140) “pada dasarnya dalam mendesain pemberdayaan masyarakat perlu adanya penggabungan antara konsep, strategi, dan teknik, sehingga pemberdayaan masyarakat berjalan secara optimal”. Sedangkan A.rex (1990:39) “lebih menegaskan bahwa dalam mengoptimalkan program pemberdayaan dibutuhkan: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, dan 3) evaluasi.

Strategi dasar dalam pemberdayaan (pendekatan pelayanan masyarakat/ Community Service Approach) pada umumnya dilandasi pada upaya mengoptimalkan strategi Pendidikan luar Sekolah. Menurut Sudjana (2010:165) strategi pemberdayaan Luar sekolah dapat diuraikan sebagai berikut: “ 1) tahap persiapan/perencanaan, 2) Tahap pelaksanaan, dan 3) Tahap evaluasi. Selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan / perencanaan

Pelaksanakan kegiatan/program tentunya harus ada tahap perencanaan. Suharto (2009: 73), menjelaskan bahwa “perencanaan program sangat tergantung pada asumsi dan tujuan dari perencanaan sosial itu sendiri. Dalam tahap perencanaan terdapat empat bagian yaitu perekrutan sasaran pemberdayaan, sasaran pemberdayaan, tujuan pemberdayaan dan program-program pemberdayaan”.

A. Rex (1990:42) menyatakan bahwa suatu persiapan diperlukan oleh lembaga atas dasar beberapa alasan,yaitu :

1. Efisiensi *(efficiency)*, tujuan dasar dari suatu efissiensi adalah usaha untuk mencapai tujuan dengan biaya dan upaya yang minimum tetapi mendapatkan hasil yang sama baiknya.Skidmore meyakini bahwa ha ini baru bisa terjadi bila dilakukan perencanaan secara seksama dan juga merupakan suatu proses antisipasi (anticipatory process) terhadap berbagai masalah.
2. Keefektifan *(effectiveness)*, melihat bahwa keefektifan diukur berdasarkan variable-variabel kriteria *(criterion variable)* yang diciptakan dalam hubungan dengan pencapaian tujuan.Berdasarkan criteria-kriteria ini petugas dapat menilai apakah program yang telah mreka jalankan dapat dikategorikan sebagai hasil ataukah tidak. Akan tetapi,hasil yang diinginkan mungkin tidak dapat dicapai apabila tidak dilakukan perencanaan terlebih dahulu.
3. Akuntabilitas *(accountability)*,ada dua akuntabilitas yang perlu diperhatikan yaitu akuntabilitas lembaga dan akuntabiitas individu.Dimanapun akuntabilitas itu mengarah,suatu perencanaan yang seksama dapat mengarahkan para tenaga professional untuk mengoperasionalkan pekerjaan mereka.
4. Moral *(morale),* percaya bahwa perencanaan yang dilakukan merupakan hal yang sangat pentinguntuk meningkatkan moral lembaga.para staf organisasi embutuhkan penyaluran kreatifitas, perasaan dapat mencapai suatu *(being of achievement)*,dan kepuasan dalam upaya meningkatkan kinerja mereka.

Dari teori di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam setiap melakukan kegiatan apapun itu diperlukan tahap perencanaan, karena didalam tahap perencanaan terdapat empat hal yang sangat penting yang dapat dijadikan sebagai pedoman kegiatan dalam pencapaian keberhasilan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan.

1. Tahap pelaksanaan

Suharto (2009: 80) menjelaskan,“pelaksanaan adalah proses dari langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat”. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan merupakan implementasi dari aksi sosial yang prakteknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam penanganan masalah sosial.

Kegiatan pelaksanaan program merupakan suatu proses yang dimulai dari implementasi awal atau pre-implementasi, implementasi dan implementasi akhir. Implementasi awal mencakup kegiatan-kegiatan persiapan sebelum program kegiatan dilakukan. Implementasi kegiatan merupakan semua aspek kegiatan teknis yang dilakukan pada sesi kegiatan termasuk koordinasi administratif, dokumentasi, dan dukungan financial sedangkan implementasi akhir *(postimplementation)* mencakup kegiatan-kegiatan administratif dan financial yang diperlukan sesudah program dilaksanakan, termasuk kegiatan pelaporan, proses, dan hasil program kegiatan.

Dari teori di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam setiap tahap pelaksanaa terdapat tiga aspek yang sangat penting yang dapat dijadikan sebagai pedoman kegiatan dalam pencapaian keberhasilan suatu program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

1. Tahap evaluasi

Evaluasi menunjukkan suatu usaha untuk memperoleh informasi atau keterangan dari hasil suatu program dalam menentukan nilai *(value)* yang dipandang dari sudut informasi tersebut. Evaluasi dari setiap kegiatan sangatlah penting, karena dalam evaluasi orang berusaha menentukan nilai atau manfaat dari pada kegiatan, dengan menggunakan informasi yang tersedia. Setiap penyelenggaraan suatu program kegiatan diperlukan biaya yang cukup besar, agar biaya yang dikeluarkan tidak sia-sia dan program kegiatan yang diselenggarakan itu dapat mencapai sasarannya, maka program kegiatan perlu dinilai atau dievaluasi.

Suharto (2010:119) menjelaskan bahwa “evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Evaluasi lebih difokuskan pada pengidentifikasian kualitas program”.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan yang menentukan keberhasilan suatu program.

1. **Pelatihan Kewirausahaan**
2. Pengertian pelatihan kewirausahaan

Menurut Rahayu Intan (2011: 18) bahwa [pelatihan kewirausahaan adalah pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja](http://infointermedia.com/tujuan-pelaksanan-pelatihan) individu maupun organisasi. Oleh karena itu kegiatan [pelatihan](http://infointermedia.com) harus dirancang sedemikian rupa agar benar-benar memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pelaksanaannya.

Pelatihan yang mengarah kepada kewirausahaan merupakan suatu langkah yang penting dan perlu dilakukan dalam rangka membentuk/mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Tujuan akhir yang ingin dicapai yaitu bahwa pelatihan kewirausahaan ini akan berdampak/berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan dalam bidang usaha dan mempunya sikap jiwa kewirausahaan dan diharapkan akan mampu menciptakan kemandirian yang baik dalam sikap maupun dalam berusaha.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PMTK (2002: 32) bahwa kewirausahaan merupakan:

Kecakapan atau kemampuan seseorang dalam menciptakan dan mengelola suatu usaha atau kerja untuk mendapatkan nilai ekonomis yang lebih besar. Beberapa kecakapan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam berwirausaha antara lain:

1. Kreativitas
2. Keberanian mengambil resiko
3. Ketekunan dan keuletan
4. Percaya diri
5. Motivasi
6. Kemandirian

Secara teknis untuk dapat berwirausaha dengan baik perlu menguasai keterampilan-keterampilan berikut:

1. Keterampilan teknik berwirausaha
2. Keterampilan mencari informasi
3. Keterampilan berkomunikasi
4. Keterampilan dalam pemecahan masalah
5. Keterampilan dalam perencanaan
6. Keterampilan dalam pengelolaan usaha
7. Keterampilan dalam menganalisis pasar
8. Keterampilan mengantisipasi peluang

Menurut Charney & Libecap, (2000: 20) bahwa di negara-negara maju pelatihan kewirausahaan populer karena 5 alasan yaitu:

1. Pembuatan rencana usaha mengarahkan masyarakat menggabungkan akuntansi, ekonomi, keuangan, pemasaran dan disiplin bisnis lainnya.  Sehingga menjadikan pengalaman pelatihan  yang  terpadu dan memperkaya.
2. Pelatihan kewirausahaan dapat mempromosikan pendirian usaha baru oleh lulusan atau memperkuat prospek penerimaan kerja dan  keberhasilan lulusan di pasar tenaga kerja
3. Pelatihan kewirausahaan dapat mempromosikan transfer teknologi ke pasar melalui pengembangan rencana usaha yang berbasis teknologi
4. Pelatihan kewirausahaan menciptakan hubungan antara komunitas bisnis dan komunitas perguruan tinggi.  Pelatihan kewirausahaan dipandang oleh pemimpin usaha sebagai aplikasi  pendekatan yang bermanfaat untuk belajar bisnis dan ekonomi, dan mereka telah membuka diri bersedia mendanai program kewirausahaan serta menyediakan tempat untuk magang.
5. Karena tidak ada pendekatan yang baku untuk pelatihan kewirausahaan ini, dan kewirausahaan berada di luar batas disiplin ilmu yang tradisional, maka memungkinkan sekali untuk melakukan percobaan-percobaan dalam kurikulumnya.
6. Manfaat pelatihan kewirausahaan

Menurut Charney & Libecap, (2000: 32) bahwa dalam menjalankan sebuah pelatihan kewirausahaan memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Peluang untuk menentukan nasib anda sendiri
2. Peluang untuk melakukan perubahan
3. Peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya
4. Peluang untuk meraih keuntungan yang menakjubkan
5. Peluang untuk berperan dalam masyarakat
6. Peluang untuk melakukan sesuatu yang anda sukai
7. Tujuan pelatihan kewirausahaan

Dari beberapa konsep tentang pelatihan dan manfaat kewirausahaan, maka dapat diperoleh gambaran dari tujuan pelatihan kewirausahaan mulai dari tujuan yang sederhana sampai pada tujuan yang lebih lengkap.

Menurut Kamil, Mustofa (2007: 120) bahwa tujuan-tujuan pelatihan kewirausahaan antara lain:

1. Mewujudkan gagasan inovatif dari seseorang dalam bidang usaha.
2. Menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dalam bidang usaha.
3. Mengganti tatanan ekonomi dengan mengenalkan produk, layanan, penciptaan pengelolaan, dan menggali bahan-bahan mentah baru dalam usaha.
4. Suatu proses untuk mengerjakan sesuatu yang baru.
5. Menciptakan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah-masalah dalam bidang usaha.
6. Mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam memecahkan dan memanfaatkan peluang dalam bidang usaha.
7. Menemukan cara-cara berpikir yang baru dan melakukannya dengan cara-cara tersebut dalam bidang usaha.

Beberapa tujuan pelaksanaan [pelatihan](http://infointermedia.com) kewirausahaan di atas merupakan tujuan dasanya, tetapi tujuan praktisnya akan disesuaikan dengan harapan dan keinginan perusahaan dan organisasi. Tentu saja hal ini tidak dibuat demikian saja tetapi melalui proses yang disebut dengan identifikasi dan analisis kebutuhan [pelatihan](http://infointermedia.com). Jika kita tidak melakukan tahapan ini, seringkali [pelatihan](http://infointermedia.com) tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas.

1. Proses kewirausahaan

Menurut Suryana (2001: 34) secara umum proses kewirausahaan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Tahap memulai, tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan *franchising*. Juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan apakah di bidang pertanian, industri/ manufaktur/produksi atau jasa.
2. Tahap melaksanakan usaha atau diringkas dengan tahap "jalan", tahap ini seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek : pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi.
3. Mempertahankan usaha, tahap di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi
4. Mengembangkan usaha, tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positifatau mengalami perkembangan atau dapat bertahan maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil.

Hakekat dari proses kewirausahaan pada dasarnya merupakan proses pembelajaran penanaman tatanan nilai pelatihan kewirausahaan melalui pembiasaan dan pemeliharaan perilaku, menanamkan sikap, pembukaan wawasan dan pembekalan pengalaman.

1. Indikator pelatihan kewirusahaan

Suatu program pelatihan kewirausahaan dapat dikatakan efektif kalau tujuan pelatihan yang dirumuskan berhasil dicapai oleh peserta didik dan juga bermanfaat bagi lingkungan.

Menurut Kirkpatrick (1998) berdasarkan suatu pelatihan kewirausahaan membuktikan  adanya hasil yang  positif berdasarkan indikator yang dari pelatihan kewirausahaan  secara kognitif, afektif, dan keterampilan psikomotor

Tabel 2.1 Deskripsi Ranah Pembelajaran dan Indikato Program Pelatihan Kewirausahaan Teori Kirkpatrick

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ranah pembelajaran | Penjelasan | Indikator program pelatihan kewirausahaan |
| Kognitif | Memerlukan proses berfikir.  Intinya pada pemahaman, memori, analisa, dan evaluasi | Atribut positif :  mencari resiko,  komitmen, dan peluang  Keahlian dan kompetensi : riset/pengembangan ide-ide bagus  Fenomena yang berkaitan dengan organisasi : intrapreneurship dan membuat pilihan-pilihan gaya hidup |
| Afektif | Meliputi sikap, emosi,  perasaan  serta fikiran | Kewirausahaan memunculkan perasaan positif  Kewirausahaan bermanfaat bila diterapkan pada individu dan organisasi |
| Keterampilan psikomotor | Belajar menuntut proses berfikir dan aktifitas tubuh seperti membuat model | Melibatkan konsep inovasi  Berkaitan dengan individu dalam hal berfikir kreatif,  dorongan untuk berhasil, pengambilan resiko dan fleksibilitas. |

Sumber: Kirkpatrick (1998)

Pelatihan kewirausahaan dengan ranah pembelajaran kognitif dengan indicator atribut positif : mencari resiko artinya segala kemungkinan yang baik dan buruk, positif dan negatif termasuk untung rugi selama menjalankan usaha; Komitmen, dan peluang artinya dalam membuka dan menjalankan usaha harus memiliki keyakinan dan sikap optimis bahwa usaha yang dijalankan akan berhasil; Keahlian dan kompetensi : riset/pengembangan ide-ide bagus artinya kemampuan dalam menciptakan ide-ide atau gagasan; Fenomena yang berkaitan dengan organisasi: intrapreneurship dan membuat pilihan-pilihan gaya hidup artinya seseorang atau sekelompok memiliki jiwwa kewirausahaan.

Pelatihan kewirausahaan dengan ranah pembelajaran afektif dengan indikator: kewirausahaan memunculkan perasaan positif artinya pelaku wirausaha memiliki keyakinan bahwa wirausaha akan membawa manfaat bagi diri pelaku wirausaha; Kewirausahaan bermanfaat bila diterapkan pada individu dan organisasi astinya dapat menjadi sumber dalam memiliki mata pencaharian baru.

Pelatihan kewirausahaan dengan ramah keterampilan psikomotor melibatkan konsep inovasi artinya dapat mengembangkan ide-ide baru dalam berwirausaha; berkaitan dengan individu dalam hal berfikir kreatif, dorongan untuk berhasil, pengambilan resiko dan fleksibilitas untuk pengembangan usaha yang dijalankan.

1. **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kewirausahaan**

Menurut Sihombing (2000: 3) mengemukakan bahwa pendidikan luar sekolah adalah:

1) Usaha sadar yang diarahkan untuk menyiapkan, meningkatkan, dan mengembangkan sumber daya manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan daya saing untuk merebut peluang yang tumbuh dan berkembang dengan mengoptimalkan sumber-sumber yang ada di lingkungannya. 2) Suatu proses memanusiakan manusia untuk meningkatkan kualitas berpikir, moral dan mental sehingga mampu memahami, mengungkapkan, membebaskan dan menyesuaikan dirinya terhadap realitas yang melingkupinya.

Sedangkan menurut Made, P (1997) memandang bahwa program pendidikan luar sekolah orientasinya lebih terarah kepada keterampilan untuk bisa menghidupi dirinya sendiri dalam program kejar usaha.

Pendidikan sebagai upaya mencerdaskan bangsa berarti memberdayakan setiap warga negara agar mampu berbuat seimbang baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, antara hak dan kewajiban, menjadi warga negara yang bersikap dan berbuat demokratis terhadap sesama manusia menuju masyarakat yang memahami akan hak, kewenangan dan tanggung jawab mereka dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Proses pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal, sesungguhnya merupakan sebuah upaya yang memungkinkan masyarakat dengan segala keberadaannya dapat memberdayakan dirinya. Dengan pusat aktivitas harusnya berada di tangan masyarakat itu sendiri dengan bertitik tolak dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan manfaatnya untuk masyarakat atau dengan istilah lain pendidikan berbasis pada masyarakat.

Konsep pelatihan kewirausahaan dalam proses pembelajaran sebenarnya bukan hal yang baru karena memiliki pengertian luas dari sekedar untuk menghidupi diri sendiri. Namun persoalannya, bukan sekedar keterampilan tetapi bagaimana caranya memberi pendidikan yang betul-betul mampu membuat seseorang dapat memberdayakan dirinya sendri.

Pelatihan kewirausahaan merupakan pengetahuan dan pembelajaran keterampilan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat memperoleh keterampilan melalui penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan. Melalui kegiatan pelatihan tersebut dapat membantu masyarakat yang tidak tau ataupun kurang mempunyai keterampilan , setelah mengikuti kegiatan tersebut mampu memberdayakan dirinya sendri dan dapat penghidupan yang layak bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.

Oleh karena itu hadirnya pelatihan kewirausahaan di tengah tengah masyarakat amat sangat membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan sehingga mereka dapat penghidupan yang layak dan pekerjaan yang memadai.

1. **Kerangka Pikir**

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentang dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan masayarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakekatnya merupakan kemanpuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atau permasalahan yang dihadapi. Kondisi kognitif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang diharapkan pada perilaku sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan kondisi yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemanpuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Jadi indikator dalam pemberdayaan masayarakat melalui model pelatihan kewirausahaan adalah kognitif, efektif dan psikomotor.

Indikator di atas menerangkan bahwa ada keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat dengan kondisi kognitif , afektif dan psikomotor. Yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, berpikir dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemanpuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang di pandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemanpuan yang terdiri atas kemanpuan kognitif,afektif dan psikomotorik dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Pelatihan kewirausahaan membuktikan  adanya hasil yang  positif berdasarkan indikator yang dari pelatihan kewirausahaan  secara kognitif, afektif, dan keterampilan psikomotor.

Dalam menentukan adanaya keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat dan pelatihan kewirausahaan Untuk memperjelas indikator dari pemberdayaan masyarakat dan pelatihan kewirausahaan di Yayasan Pabatta Ummi Kota Makasar, penulis membuat bagan kerangka pikir, sebagai berikut :

**Yayasan Pabatta Ummi Kota Makassar**

**Jenis Program**

**Pelatihan Kewirausahan**

**Pendidikan**

**Penelitian**

1. **Kognitif**
2. **Afektif**
3. **Psikomotor**

**Pemberdayaan Masyarakat**

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Ket :

Bukan merupakan fokus kajian

Merupakan fokus kajian